



# Distribusi Air PDAM Macet

## Karena Alat Rusak

**AMLAPURA** - Distribusi air PDAM Karangasem mengalami gangguan. Hal ini sebagai dampak dari kerusakan alat pada pipa saluran ke 4000 pelanggan. Akibatnya, pelanggan di Kota Amlapura pun menjerit karena macetnya distribusi air ini.

Kondisi ini diakui Direktur PDAM Karangasem I Gede Tantra Baktiyasa, dihubungi Selasa (31/3). Kepada koran ini, Baktiyasa menuturkan, terganggunya distribusi air itu terjadi sejak sekitar enam hari lalu. Itu lantaran ada kerusakan alat pada pipa di Ujung Hyang. Pipa ini, mengalir sekitar 4.000 pelanggan di wilayah Desa Seraya. Akibat, kerusakan itu, pasokan air PDAM ke Seraya macet total. "Kalau sudah itu (alat di pipa distribusi, Red) rusak, sama sekali tidak bisa mengalir," kata Baktiyasa.

Untuk meminimalkan keluhan pelanggan di Seraya, pihaknya



**Kalau sudah itu (alat di pipa distribusi, Red) rusak, sama sekali tidak bisa mengalir."**

**I Gede Tantra Baktiyasa**  
Direktur PDAM Karangasem

berupaya membagi pasokan air dari daerah lain. Yakni pasokan air yang bersumber di Embukan, Desa Ababi, Kecamatan Abang, yang mengalir pelanggan di wilayah Kota Amlapura. Dengan jalan itu, pelanggan di Seraya akhirnya bisa menikmati air, namun pendistribusiannya yang tidak normal. Baik pelanggan di Seraya, maupun di wilayah Kota Amlapura. Bahkan, untuk wilayah Asak, bisa bergilir karena lokasinya tinggi.

"Kalau tidak dengan cara begitu, kan kasihan pelanggan di Seraya. Cuma, dimaklumkan, pendistribusian *klebet-klebet*," ujar Baktiyasa.

Diapun menegaskan, jumlah pelanggan yang mengalami gangguan distribusi mencapai belasan ribu. Rinciannya, pelanggan di Seraya sekitar 4.000, dan wilayah Kota Amlapura sekitar 15 ribu. Di mana, sekitar 90 persen atau 13.500 pelanggan di wilayah Kota Amlapura mengalami gangguan. "Yang terganggu hanya di wilayah Kota Amlapura, kecamatan lain tidak," sebut pejabat asal Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem, ini.

Pembagian ini, tegas Baktiyasa, harus dilakukan, karena kerusakan di Ujung Hyang, paling cepat bisa diatasi dalam dua minggu. Dan, paling lama mencapai sebulan. Karena, setelah menghubungi rekanan, ternyata alat yang perlu diganti disebutkan tidak ada di Indonesia. "Kalau harga tak masalah. Cuma tidak ada di Indonesia. Itu kata rekanan. Jadi kerusakan paling cepat bisa ditangani dalam waktu dua minggu. Paling lama satu bulan," pungkasnya. (wan/yor)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 25



## DPRD Jembrana Dukung Terminal Kargo

NEGARA - Rencana pembangunan terminal kargo di Gilimanuk akan dimulai tahun 2016 mendatang. Saat ini hanya tinggal menunggu realisasi anggaran dari pemerintah pusat untuk mewujudkan tempat singgah bagi kendaraan yang masuk Bali. Terutama yang melebihi muatan.

Nah, menurut Ketua DPRD Jembrana I Ketut Sugiasa, rencana pembangunan terminal kargo tersebut *Detail Engineering Design* (DED) sudah rampung. Lokasi terminal akan menggunakan bekas lahan pemukiman seluas 3,5 hektare yang selama ini telantar di Jalan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya sebelah barat SPBU Cekik.

Pertimbangan pembangunan terminal kargo tersebut selain karena lahan yang terlantar, pertimbangan lain adalah risiko di jalan terutama bagi kendaraan yang melebihi muatan. Kendaraan melebihi muatan sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.

Dari hasil koordinasi Kementeri-

an Perhubungan sudah ada sinyal positif penggunaan lahan tersebut jadi terminal kargo. Menurutnya, sebenarnya ada sedikit perbedaan pemahaman terkait penggunaan lahan yang masuk kawasan TNBB (Taman Nasional Bali Barat). Karena itu permohonan tersebut ditolak kementerian kehutanan. "Rencana awal memang ada usulan penambahan lahan yang masuk kawasan TNBB dari koordinasi terakhir permohonan itu ditolak," jelasnya.

Sebenarnya, penambahan lahan di kawasan TNBB itu bukan untuk terminal kargo melainkan penunjang pariwisata, karena sejatinya lahan untuk Terminal Kargo sudah tersedia. Permohonannya untuk penunjang pariwisata, seperti dengan *rest area* serta penataan sekitar lokasi Terminal Kargo.

Pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan TNBB terkait zona-zona yang bisa dimanfaatkan untuk penunjang pariwisata terpadu di Gilimanuk. Saat ini pemer-

intah kabupaten bertanggungjawab atas penataan sekitar

lahan yang akan dijadikan terminal kargo. (bas/pit)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 23



## Irigasi Jatiluwih Jebol Lagi

**SEMENTARA** itu, di Tabanan, bukan saluran distribusi air minum yang macet. Namun, saluran irigasi di kawasan pertanian abadi Jatiluwih, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan yang dulu sempat jebol sepanjang 40 meter dan belum mendapat perbaikan, justru kini jebol lagi sepanjang 3 meteran. Sehingga petani dikawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) semakin menjerit.

Untuk sementara jebolnya saluran irigasi sepanjang 3 meter tersebut ditambal menggunakan karung berisi tanah. Upaya itu dilakukan petani setempat, supaya air yang datang dari hulu tidak bocor dan mengalir sampai hilir. Sehingga warga subak mendapatkan air dengan merata.

I Wayan Semarajaya, pengurus salah satu pengurus subak Jatiluwih Selasa (31/3) mengatakan jebolnya irigasi ini terjadi Senin. Petani pun gotong royong menambal irigasi yang jebol menggunakan karung yang berisi tanah. Kalau ini tidak dilakukan, katanya, maka air yang mengalir dari hulu ke hilir terganggu. Sehingga tanaman padi petani yang di hilir tidak sampai kekurangan air. "Karena umur padi saat ini sedang membutuhkan air yang banyak," kata dia. (gin/yor)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 25



## Radar Bali

# Kejari Angkut Dua Kardus

### Saat Geledah Kantor Pemkot

**DENPASAR** - Kejari Denpasar akhirnya berhasil menggeledah kantor Pemkot Denpasar, kemarin (31/3). Hasilnya, sekitar dua kardus dokumen diangkut oleh tim pimpinan Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir.

Suasana di Kejari Denpasar tampak tak begitu ramai hingga pukul 11.30. Tak ada kabar kalau ada pengeledahan di Pemkot Denpasar. "Semua ke acara resepsi pernikahan seorang jaksa di Mengwi," ujar sumber koran ini.

Ternyata usai acara tim kejari langsung masuk pemkot dipimpin oleh Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir. Dia mengajak beberapa personel masuk ke pemkot dan memeriksa Kabag Keuangan Pemkot Denpasar Made Widra dan Bagian Hukum. Tim jaksa menemui Kasubag Bagian Hukum Pemkot Denpasar KM Lestari Kusuma.

"Kabag Keuangan lama diperiksa, dan akhirnya data - data mengalir lancar tidak seperti sebelumnya. Di Bagian Hukum, kembali ditemui oleh Komang Lestari, lantaran Kabag Hukum-nya masih di Jakarta," ungkap sumber koran ini.

Dikonfirmasikan ke Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir membenarkan bahwa dirinya ke Pemkot Denpasar. Dia mengaku usai acara pernikahan langsung terjun ke Denpasar untuk mengambil data - data ke Pemkot Denpasar ■

► *Baca Kejari... Hal 31*



**Berapa ya? Ada satu koper atau dua kardus itu (data yang didapat, Red)."**

**SYAHRIR SAGIR**  
Kasi Intel Kejari Denpasar



## Radar Bali

Sambungan

# Kumpulkan Beberapa Staf

### ■ KEJARI...

Sambungan dari hal 21

Dia mengatakan, pihaknya berhasil mendapatkan data yang diperlukan. Berapa banyak dapat data? "Berapa ya? Ada satu koper atau dua kardus itu (data yang didapat, Red)," ungkapnya.

Dia mengaku bahwa pejabat sudah kooperatif atas masalah ini. Bahkan, dia menyebutkan sebelumnya jajaran pejabat mengatakan wajib atas seizin Sekkot Rai Iswara seperti halnya langsung diklarifikasi dari Sekkot. "Ada imbauan katanya tadi, mau jaksa atau polisi wajib kooperatif jika ada yang meminta data. Sehingga tadi lancar. Saya dapat data dari Kabag Keuangan dan Bidang Hukum," ungkapnya.

Syahrir mengatakan bahwa data dari pihak Bagian Keuangan, langsung dijelaskan oleh Kabag Keuangan Made Widra. Syahrir mengaku cukup lama meminta penjelasan lantaran

menyangkut teknis keuangan mesti ada penjelasan yang lebih detail. Terkait dengan temuan BPK dalam kaitan dana perjalanan dinas (perdin). "Dari dana perjalanan dinas itu, kami sudah minta penjelasan. Juga minta penjelasan ke Komang Lestari di Bagian Hukum," lanjutnya.

Tak hanya itu. Syahrir juga mengatakan data - data ini akan didalami. Kemudian akan dilakukan pembahasan internal. Jika memang nanti ada indikasi - indikasi mengarah pada kasus korupsi, baru akan dilanjutkan dengan pemanggilan. "Dua hari *kayaknya* cukup untuk kami mendalami. Kalau memang sudah lengkap dan ada indikasi mengarah korupsi, kami tindaklanjuti dengan pemanggilan," janjinya.

Ada rencana turun lagi? "Besok (hari ini, Red) tidak. Sementara cukup dulu data - data ini. Kalau ada indikasi kami lanjutkan pemanggilan," imbuhnya mengulang.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dikabarkan memanggil beberapa staf terkait datangnya tim dari Kejari Denpasar, sehari sebelumnya, Senin (30/3). Dewa Gede Rai dari Humas Kota Denpasar membenarkan beberapa staf dipanggil wali kota. Namun, pihaknya membantah jika pemanggilan tersebut ada kaitannya mengenai masalah datangnya pihak kejari ke Pemerintah Kota Denpasar. "Hanya dipanggil masalah koordinasi saja, tidak ada bahas masalah pemeriksaan kejari tersebut," ujarnya singkat.

Seperti halnya berita sebelumnya, pihak Kejari Denpasar gagal mendapatkan data. Kondisi berbelit - belit di Denpasar kabarnya sudah berulang kali. Hingga akhirnya datang pada Senin lalu (30/4) ke Pemkot Denpasar. Namun, tetap tak membuahkan hasil.

Kasus yang dialami semen-

tara adanya penyimpangan perjalanan dinas dengan jumlah nilai anggaran perjalanan dinas di pemkot mencapai Rp 32,4 miliar lebih. Selain itu ada beberapa lagi penyimpangan Pemkot Denpasar atas temuan BPK RI Wilayah Bali.

Terkait dengan permainan perjalanan dinas diduga ada kelebihan bayar sekitar Rp 565 juta lebih. Tak hanya itu, pemeriksaan atas 4.982 lembar bukti tiket Garuda Indonesia, senilai Rp 10,4 miliar lebih pada 34 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) juga didapatkan selisih antara bukti fisik tiket sebanyak 933 lembar tiket dengan harga Rp 2,4 miliar lebih. Selain itu, juga didapatkan adanya perjalanan dinas yang fiktif dengan nilai Rp 15 juta lebih. Perjalanan dinas fiktif ini ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Perhubungan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura. (art/hen/yes)

hal. 2

Edisi : Rabu, 1 April 2015 -

Hal : 21 dan 31



## KORUPSI RPH TEMESI ✓



MIFTA HUDDIN/RADAR BALI

**TUNGGU VONIS:** Kadek Aristana saat meninggalkan sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

### **Aristana Dituntut 1,5 Tahun**

**KASUS** korupsi RPH (Rumah Potong Hewan) Temesi, Gianyar, dilanjutkan kemarin dengan agenda sidang tuntutan. Jaksa menyampaikan tuntutan dengan menyatakan terdakwa Kadek Aristana selaku pemilik lahan bersalah. Jaksa akhirnya menuntut Aristana 1,5 tahun di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin. Sebelumnya dua terdakwa lainnya sudah dituntut Jaksa.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Erly Sulistyorini dengan tim Jaksa Muhammad Arifin, Widi Wicaksono, Hardian Rahadi, I Nengah Astawa dan Fajar Said. Terdakwa Kadek Aristana didampingi pengacara Ketut Jaya. Jaksa membacakan tuntutan bahwa, Terdakwa terbukti bersalah turut serta dalam melakukan korupsi. Sesuai dengan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Undang-Undang yang sama. "Menuntut, memohon agar majelis menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun)," tegas Jaksa.

Selain itu jaksa juga menuntut hukuman denda Rp 50 juta, subsider 2 bulan penjara. Artinya jika tidak membayar denda, hukumannya ditambah 2 bulan kurungan.

Selain itu juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti dengan nilai Rp 36,4 juta. Jika tidak mengembalikan kerugian negara, hukumannya akan ditambah 1 bulan penjara. (art/han)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

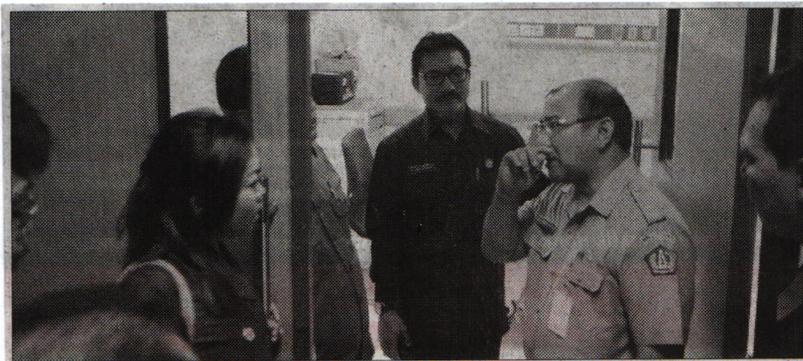
Hal : 24



## Radar Bali

Pansus Aset DPRD Bali Telusuri Aset Pemprov

# Pertama Datangi Badung, Soroti Aset yang Tak Didata



HUMAS DPRD BALI FOR RADAR BALI

**CEK:** Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan (tengah) saat penelusuran aset Pemprov di Badung, kemarin.

Panitia Khusus (Pansus) Aset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, kemarin (31/3) mulai melakukan penelusuran terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang tersebar di kabupaten/kota di Bali.

**DALAM** penelusuran aset Pemprov, pansus aset pertama kali mendatangi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Ketua Pansus Aset DPRD Bali Wayan Gunawan bersama rombongan yang berjumlah 14 orang langsung turun melakukan pengecekan. Sedangkan dari pihak eksekutif yang ikut dalam rombongan, yakni Kepala Biro (Karo) Aset Sekda provinsi Bali Ketut Adiarsa.

Rombongan Pansus Aset DPRD Bali ke Badung diterima Kepala Bagian Aset Setda Kabupaten Badung Drs. I Wayan Puja, MSi., di kantor bupati Badung, sekitar pukul 10.00.

Anggota Pansus yang hadir adalah Nyoman Parta, Ketut Tama Tenaya, Dewa Nyoman Rai, Ni Made Sumiati,

Gede Suamba, Nyoman Budi Utama, Made Budastra, Nyoma Wirya, Ni Putu Yuli Artini, Gusti Putu Widjera, Tjok Gede Asmara Putra Sukawati, Bagus Suwitra Wirawan, dan Made Arini.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, Pansus Aset mencecar Kepala bagian Aset Pemkab Badung Wayan Puja dengan berbagai pertanyaan mengenai status aset khususnya tanah milik Pemprov Bali yang digunakan Pemkab Badung. "Kami perlu mengetahui status aset-aset tersebut. Bagaimana mengelola manajemen aset Pemkab Badung dan pola kerjasamanya, apakah pinjam pakai, disewa atau dihibah. Dari aspek hukum dan administratif apakah sudah terpenuhi. Kami harus mendapat data yang lengkap soal aset-aset itu," kata Ketua Pansus Aset Wayan Gunawan.

Sedangkan Anggota Pansus Aset lainnya, Ketut Tama Tenaya kemarin mengingatkan Pemkab Badung agar persoalan aset menjadi salah satu catatan kritis yang mempengaruhi opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Bali. Karena itu ia meminta Pemkab Badung untuk mendata dengan serius semua aset-aset yang ada. "Hibah tanah Pemprov di Badung menjadi

hal. 1

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 23



## Radar Bali

Sambungan .

catatan BPK. Pengelolaan aset-aset itu memengaruhi opini BPK (terhadap laporan keuangan) Pemprov Bali dan Badung," kata Tama Tenaya.

Politisi PDIP ini menyoroti keberadaan aset yang tidak didata dengan baik. Ia menilai banyak aset Pemprov Bali di Badung yang belum teridentifikasi. Menurut dia, antara dokumen dan keberadaan secara fisik aset tersebut harus valid. "Berikan informasi jika ada aset pemprov di Badung yang belum teridentifikasi. Informasi itu yang ingin kita dapat," ujarnya.

Sorotan terhadap aset-aset yang

tidak teridentifikasi pemkab Badung juga dilontarkan anggota Pansus Aset lainnya, Dewa Nyoman Rai. Ia meminta Pemkab Badung dan Pemprov Bali untuk melakukan pendataan dan membuat sertifikat terhadap aset berupa tanah yang tersebar di kabupaten Badung. Ia memberi contoh lahan di Bukit seluas 21 hektare yang belum dibuatkan sertifikatnya. "Banyak yang belum teridentifikasi. Harus buat sertifikat," kata Dewa Rai.

Sedangkan Ni Made Sumiati menambahkan, pendataan dan pembuatan sertifikat terhadap aset berupa tanah

itu penting untuk segera dilakukan sehingga tidak ada yang melakukan penyerobotan dan mengambil alih kepemilikannya. "Aset pemprov di kabupaten/kota harus didata dan disertifikat. Segera minta pemprov untuk buat sertifikatnya sehingga tidak ada penyerobotan. Selain itu harus ditindak tegas pihak yang melakukan penyerobotan. Itu ilegal," tegas Sumiati. Ia melanjutkan, untuk aset-aset yang tidak produktif yang tidak bisa digunakan untuk mendukung pelayanan pemerintah, harus dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga bernilai ekonomis dan berkontribusi pada peningkatan PAD. "Itu bisa dikontrakkan sehingga bisa menambah PAD," kata srikandi PDIP asal Karangasem ini.

Pada kesempatan itu Kepala Biro Aset Setda Provinsi Bali Ketut Adiarsa mengungkapkan, aset tanah milik Pemprov Bali yang telah dimanfaatkan Pemkab Badung sebanyak enam bidang dengan luas 47.785 Meter Persegi. Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya bersama Tim Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aset terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemprov di kabupaten/kota.

Sementara itu Kepala Bagian Aset Setda Kabupaten Badung Drs. I Wayan

Puja, MSI, mengatakan, aset Pemprov yang digunakan Pemkab Badung pada awalnya menggunakan skema kerja sama izin pemanfaatan. Namun karena adanya perubahan regulasi sekarang menggunakan skema kerjasama pinjam pakai yang harus diperpanjang setiap dua tahun. Wayan Puja mengakui masih ada persoalan pendataan aset milik Pemprov di kabupaten Badung. Karena itu pihaknya berjanji untuk menuntaskan penyelesaian permasalahan aset-aset tersebut dan akan proaktif dengan Pansus Aset DPRD Bali untuk memberikan informasi dan data aset-aset tersebut. Di hadapan Pansus Aset, Wayan Puja menegaskan, seluruh aset Pemprov yang digunakan Pemkab Badung hanya untuk kepentingan mendukung pelayanan Pemkab Badung. "Tidak ada aset Pemprov yang kami gunakan untuk kepentingan di luar pelayanan SKPD," tegasnya.

Usai menemui Pemkab Badung, rombongan Pansus Aset tersebut melakukan sidak ke RSUD Kapal, Badung. RS milik Pemkab Badung itu dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali. Sidak itu untuk memastikan lahan milik Pemprov Bali itu benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk membangun RSUD Kapal. (adv)